

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, STAIN Press, Purwokerto, 2010.

Rifai, Amuzulian, *Teori Sifat Hakikat Negara*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2010.

Wardaya, K Manunggal, *Konstitusionalisme Dalam Dinamika Negara Hukum*, Indepth Publishing, Lampung, 2014.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.

_____, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Huda, Ni'matul, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI*, Nusa Media, Bandung, 2014.

_____, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.

Surono, Agus, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, 2013.

Ekatjhajana, Widodo, *Negara Hukum, Konstitusi dan Demokrasi*, Jember University Press, Jember, 2015.

- Mulyawan, Rahman, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, UNPAD Press, Sumedang, 2015.
- Soebechi, Imam, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Qamar, Nurul, *Negara Hukum Atau Negara Undang-Undang*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Anggriani, Jum, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Penerbit Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, 2011.
- Faisal, King, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media Publishing, Malang, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981.
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-undangan II (Proses dan Teknik Pembuatannya)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 1993.

Marwan, Awaludin, *Satjipto Rahardjo: Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.

Laporan, Jurnal, Artikel:

Johanes Suhardjana, “Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, Tahun 2010, Purwokerto: Fak. Hukum Univ. Jenderal Soedirman.

Taufiqurrohman S, “Negara Konstitusional Bukan Sekedar Memiliki Konstitusi”, *Bahan Bacaan Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY RI*, 2012.

Dian Rositawati, “Mekanisme *Judicial Review*”, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007.

Imam Soebechi, “Mewujudkan Negara Hukum”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 3, Tahun 2012, Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Ni'matul Huda, “Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam NKRI”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. Edisi Khusus, Tahun 2009, Yogyakarta: Fak. Hukum UII.

M. Laica Marzuki, “Hakekat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2007, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.

Enny Nurbaningsih, “Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1, Tahun 2011, Yogyakarta: Fak. Hukum UGM.

- Lucky Sandra, "Tinjauan Buku Peraturan Daerah Bermasalah", *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 37, No. 1, Tahun 2011, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Fajri Nuryamsi, "Pengawasan Peraturan Daerah Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2015, Bandung: Fak. Hukum Univ. Padjajaran.
- Abdul Aziz Nasihudin, "Implementasi Hak Uji Materiil Peraturan Daerah Kabupaten Kota Oleh Mahkamah Agung dan pengaruhnya terhadap pemberdayaan daerah", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3, Tahun 2013, Purwokerto: Fak. Hukum Univ. Jenderal Soedirman.
- Enrico Simanjuntak, "Pengujian Perda dan Perdes Pasca Perubahan UU Pemda dan UU Desa", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 3, Tahun 2016, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Wiliam Sanjaya, "Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.", *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 3, Tahun 2015, Bandung: Fak. Hukum Univ. Padjajaran.
- Otong Rosadi, "Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indoneia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai", *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 3, Tahun 2015, Bandung: Fak. Hukum Universitas Padjajaran.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, "*Kajian tentang Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung*", Makalah Seminar Kajian Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung, Jakarta, 2011.
- Maria Farida Indrarti, "Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan", Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan

Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4958)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang PUU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV-2016 tentang PUU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen Lain:

“Ihwal Pembatalan Perda”, diakses dari <http://kompas.com/ihwal-pembatalan-perda.html>, diakses pada tanggal 8 Februari 2017.

“Polemik Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah”, diakses dari <http://theindonesiainstitute.com/polemik-kewenangan-pembatalan-perda.html>, diakses pada tanggal 27 Juni 2017.

“MK Cabut Kewenangan Mendagri Batalkan Perda Provinsi”, diakses dari <http://kompas.com/mk-cabut-kewenangan-mendagri-batalkan-perda-provinsi.html>, diakses pada tanggal 27 Juni 2017.

“Daftar Perda Bermasalah Yang Dibatalkan Pemerintah”, diakses dari <http://beritatagar.id/daftar-perda-bermasalah-yang-dibatalkan-pemerintah.html>, diakses pada tanggal 25 Juni 2017.

“Perda Bermasalah Dibatalkan Ini Penjelasan Presiden”, diakses dari <http://hukumonline.com/perda-bermasalah-dibatalkan-ini-penjelasan-presiden.html>, diakses pada tanggal 25 Juni 2017.